

Berpikir sebagai kegiatan filsafati individual memang tidak ada sangkut-pautnya dengan kehidupan komunal atau sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi dari hasil sebuah pemikiran akan memasuki pada ranah-ranah kehidupan sosial. Dengan demikian, pertanyaannya adalah mungkinkah manusia berpikir bebas sebebas-bebasnya atau justru kebebasan itu akan membawa manusia kepada ketidakbebasan ketika harus dihadapkan dengan hak kebebasan sesama manusia yang lain dalam ranah kehidupan sosial. Makalah ini mencoba membincangkan apa sesungguhnya makna kebebasan, hakikat berpikir dan hubungannya dengan etika. Untuk memudahkan pembacaan dalam persoalan tersebut dipetakan dalam tiga bilik kategori yaitu berpikir disertai dengan berbuat, berpikir tidak disertai dengan berbuat dan berbuat tidak didasari dengan berpikir.

Secara ontologis kebebasan berpikir tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi kebebasan berpikir itu secara aksiologis ketika ada pada ranah sosial dan mewujud dalam bentuk perbuatan, maka dibatasi dengan tanggungjawab dan moral. Dengan kata lain ketika berpikir disertai dengan berbuat maka tidak bebas nilai dan konsekuensinya akan ada sanksi ketika tidak sesuai dengan nilai atau norma yang disepakati. Inilah yang dimaksud dengan "ruang bertemu" antara kebebasan berpikir dan etika. Namun ketika berpikir tidak disertai dengan berbuat, maka bebas sebebas-bebasnya dan tidak mempunyai konsekuensi sanksi. Di sinilah "ruang berpisah" antara kebebasan berpikir dan etika, masing-masing terlepas dari yang lain. Dan pada ruang inilah ilmu sebagai produk pemikiran berpisah dengan nilai, sehingga "ilmu ya ilmu" tidak lagi harus dikontrol oleh etika. Bahkan dalam konteks menemukan kebenaran ilmiah dengan ukuran logika maka berpikir apapun tidak akan ada sanksi. Begitu pula, berbuat yang tidak didasari berpikir tidak akan ada sanksi. Menurut filsafat Islam, di mana dasar pijakannya adalah hikmah dan al-Qur'an, budaya berpikir dalam implementasinya, sebagaimana dicontohkan oleh nabi, adalah tidak bebas nilai. Begitu pula ilmu sebagai produk berpikir tentu juga tidak bebas nilai. Secara etika, ilmu harus dapat mensejahterakan kehidupan bukan sebaliknya. Dengan demikian ilmu sebagai sarana menemukan kebenaran berimpit "untuk tidak mengatakan lengket" dengan etika pelajaran bagi sesama manusia dan tenggungjawab agama.

HAKIKAT KEBEBASAN BERPIKIR DAN ETIKA (Mengintip Ruang Bertemu dan Ruang Berpisah)

Mahsun Mahfud¹

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, berkehendak, bersikap dan bertindak. Kegiatan berpikir merupakan karakteristik dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Al-Qur'an banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir.² Sebagai khalifah Allah di Bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan kehidupan.

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi setiap orang adalah tidak sama. Oleh karenanya kegiatan berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut.³ Karena perbedaan criteria, kebenaran ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Keduanya dapat diperoleh melalui proses berpikir.

Oleh karena itu sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau obyektifitas dalam berpikir.

¹ Penulis adalah dosen IAIN Walisongo Semarang dptk di STAINU Purworejo dan ketua STAI AN-NAWAWI Purworejo.

² Ada delapan belas ayat dalam al-Qur'an tentang berpikir dengan redaksi yang beragam, yaitu al-Maidah: 18, ali Imran: 191, al-A'raf: 175, 183, an-Nahl: 44, 11, 69, al-Hasyr: 21, Yunus: 24, ar-Ra'du: 3, ar-Rum: 8, 21, az-Zumar: 42, al-Jatsiah: 12, al-baqarah: 219, 266, al-An'am: 50, as-saba': 46. Lihat Faidullah al-Hasani al-Muqaddasi, *Fath al-Rahman li Thalib Ayat al-Qur'an*, (Jeddah: al-Haramain, tt.), h. 349.

³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Cet XVII, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2003), h. 42-43.

Membincang persoalan berpikir obyektif tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafati, karena sesungguhnya filsafat mengajak manusia berpikir menurut tata tertibnya yang berupa logika dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma serta agama) dan dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan (radikal).⁴ Jadi berpikir secara filsafati yang saya maksud adalah berpikir secara mendasar, bebas dan logis, tidak terikat nilai apapun.

Berpikir sebagai kegiatan filsafati individual memang tidak ada sangkut-pautnya dengan kehidupan komunal atau sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi dari hasil sebuah pemikiran akan masuki pada ranah-ranah kehidupan sosial. Dengan demikian, pertanyaannya adalah mungkinkah manusia berpikir bebas sebebas-bebasnya atau justru kebebasan itu akan membawa manusia kepada ketidak-bebasan ketika harus dihadapkan dengan hak kebebasan sesama manusia yang lain dalam ranah kehidupan sosial. Makalah ini mencoba membincangkan apa sesungguhnya makna kebebasan, hakikat berpikir dan hubungannya dengan etika. Kapan, di ruang mana dan dalam bentuk yang bagaimana kebebasan berpikir harus bertemu dengan etika dan sebaliknya kapan dan diruang mana keduanya harus berpisah. Untuk memudahkan pembacaan dalam persoalan tersebut dipetakan dalam tiga kategori yaitu berpikir disertai dengan berbuat, berpikir tidak disertai dengan berbuat dan berbuat tidak didasari dengan berpikir.

B. Hakikat Berpikir

Definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangan idea dan konsep.⁵ Dalam dunia metafisika, berpikir adalah sebuah proses kerja akal budi ketika menangkap pengalaman indrawi (realita) untuk

⁴ Harun Nasution, *Falsafah Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 10. Juga Franz Magnis Suseno, "Harun Nasution dan Filsafat Agama di Indonesia", dalam Abdul Halim (ed.), *Teologi Islam Rasional, Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2001), h. 125.

⁵ J. M. Bochenski, "Apakah sebenarnya Berpikir", dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), *Ilmu dalam Perspektif*, Cet. XV (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 52.

menemukan sebuah kebenaran tentang apa yang diindra. Apa yang ditangkap oleh pikiran,⁶ termasuk penginderaan dari segenap pengalaman manusia adalah bersifat mental.⁷ Mental dibagi ke dalam tiga tingkat klasifikasi yang dipresentasikan dengan pembedaan antara afektif, kognitif, dan konatif/psikomotor.⁸ Diibaratkan pikiran adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan-gemawan, maka metafisika adalah landasan peluncurnya.

Dalam berpikir menemukan kebenaran, manusia melakukan penalaran yakni berpikir melalui cara-cara yang logis dan sistematis. Sebagai kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang *pertama* adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika.⁹ Kegiatan penalaran merupakan proses berpikir sistematis-logis dalam arti melakukan sebuah kegiatan berpikir menurut suatu pola, tata tertib dan logika tertentu. Ciri *kedua* dari penalaran adalah, sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis obyektif. Kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan dengan mengikuti aturan-aturan berpikir obyektif.¹⁰

⁶ Pengertian "pikiran" ada dua; *pertama*, pikiran sebagai *mind* adalah sebuah fungsi-fungsi mencerap, mengamati, mengingat, membayangkan, memahami, merasa, membangkitkan emosi, menghendaki, menalar, dan sebagainya yang tidak memiliki suatu realitas ontologis sebagai suatu entitas atau substansi. *Kedua*, pikiran sebagai *thought* adalah merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan dunia obyektif direfleksikan dalam konsep, putusan, teori dan sebagainya, dan yang dikaitkan dengan pemecahan masalah-masalah. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 841, 846.

⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Op. Cit.*, h. 68.

⁸ A. C. Awing, *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*, terjemahan Uzair Fauzan, Rika Iffati Farikha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 162.

⁹ Secara luas, Logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara shahih. Lihat Willian S. Sahakian dan Mabel Lewis Shahakian, *Relism of Philosophy* (Cambridge, Mass: Scenkman, 1965), h. 3. Logika juga dipandang sebagai studi dan penetapan aturan-aturan penalaran pada argumen atau pada sistem pikiran. Juga bisa diartikan sebagai teori mengenai syarat-syarat penalaran yang sah. Istilah ini kali pertama digunakan oleh Alexander Aphrodisius (abad ke-2 Masehi). Lihat Lorens bagus, *Op. Cit.*, h. 520.

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Op. Cit.*, h. 43.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Cara berpikir yang tidak logis dan tidak analitis tidak termasuk ke dalam penalaran.¹¹ Dengan demikian, kebenaran yang diperoleh dengan cara berpikir yang tidak termasuk penalaran, karena tidak logis dan tidak analitis, ini tentu bersifat subyektif. Misalnya perasaan enak atau tidak enak, senang atau benci dan intuisi merupakan suatu simpulan penarikan. Seperti halnya intuisi, rasa manis, panas adalah terminologi yang diberikan manusia kepada gejala yang ditangkap melalui pancaindra. Rangsangan pancaindra ini disalurkan ke otak tanpa melalui proses kimia-fisika. Dalam hal ini, menurut aliran monistik, sebagai aliran yang berpendapat tidak membedakan antara pikiran dan zat, proses berpikir dianggap sebagai aktifitas elektrokimia dari otak.¹²

Sebagai proses elektrokimia, maka berpikir adalah bebas nilai karena pembatasnya adalah logika yang merupakan cara penarikan kesimpulan dalam berpikir, sehingga dalam proses menemukan kebenaran, validitas sebuah hasil dari proses berpikir selalu ditentukan dan diukur dengan cara-cara tertentu secara logis baik dengan menggunakan logika deduksi maupun logika induksi. Begitu pula secara ontologis, ilmu sebagai hasil dari proses berpikir secara sistematis dan logis tentunya juga bebas nilai secara total.

Namun secara aksiologi, relitanya ketika ilmu dihadapkan pada masalah moral, ketika ternyata ilmu dan teknologi membawa ekses yang merusak kehidupan, misalnya bom, senjata, dan sebagainya, para ilmuwan terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat *pertama*, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo, dimana ilmu dianggap tidak bisa didamaikan dengan agama (etika). Dalam hal ini, menurut pendapat pertama, tugas ilmuwan adalah berpikir secara nalar untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h.66.

menemukan pengetahuan. Adapun penggunaannya sepenuhnya terserah pada pengguna.¹³ Dengan perangkat metode ilmiahnya, tujuan yang hendak dicapai oleh sains adalah memformulasikan system hukum-hukum umum yang dapat berlaku universal. Bagi sains, konsep-konsep umum merupakan tujuan dalam dirinya sendiri.¹⁴ Di sinilah tampak adanya keangkuhan ilmu terhadap agama (etika)

Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa sesungguhnya netralitas ilmu terhadap nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan (ontologi), sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan pada asas-asas moral. Karena sesungguhnya tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar Charles Darwin, adalah ketika manusia menyadari bahwa manusia seyogyanya mengontrol pikirannya.¹⁵ Kontrol yang di maksud adalah nilai, moral, dan norma yang telah disepakati..

Karel Jaspers mengatakan bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Di sinilah lengketnya etika dengan ilmu. Ilmu bukan tujuan tetapi sarana, karena hasrat akan kebenaran itu berimpit dengan etika pelayanan bagi sesama manusia dan tanggungjawab secara agama.¹⁶

John F. Haught mengatakan, bahwa agama sangat erat terkait dengan sains (ilmu pengetahuan sebagai hasil berpikir) tanpa harus melebur dengannya. Implikasi-implikasi agama bagi sains jauh lebih radikal, intim, dan meyuburkan ketimbang yang dimungkinkan oleh pendekatan konflik, kontras maupun kontak.¹⁷ Walaupun antara

¹³ *Ibid.*, h. 235.

¹⁴ Talcott parson, "Ilmu Alam dan Ilmu Sosial: dalam Dennis Wrong (ed.), Max Weber: Sebuah Khazanah, terj. A. Asnawi, (Yogyakarta : Tahtera, 2004), h. 137.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ N. Daldjoeni, "Hubungan Etika dengan Ilmu", dalam Jujun S. Suriasumantri, *Op. Cit.*, h. 235.

¹⁷ Ada empat pendekatan yang digunakan oleh Haught dalam menjelaskan hubungan antara agama dan sains yaitu (1) pendekatan konflik; agama tidak bisa dipertemukan dengan sains (2) kontras; sains independent terhadap agama (3) kontak; agama dan sains saling mengadakan dialog, interaksi ,dan mungkin penyesuaian (4) konfirmasi; sains dan agama saling mendukung. Lebih lanjut lihat John F. Haughty, *Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog*, terj. Fransiskus Borgias, M.A. (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), h. 1-2.

agama dan sains berbeda satu sama lain, toh mempunyai asal-usul yang sama dalam sumber-agung yang amat jauh dan misterius, yaitu kerinduan sederhana anak manusia untuk mengetahui. Baik sains maupun agama akhirnya mengalir keluar dari hasrat “radikal” yang sama akan kebenaran yang ada pada inti terdalam eksistensi manusia. Pada ruang dan posisi inilah agama harus bertemu dengan sains dalam hubungan integratif yang harmonis.¹⁸

Pada awal 190-an, Ian Barbour dalam bukunya *Issues in Science and Religion* (1966) menampilkan gambaran bahwa hubungan sain dan agama tak selalu ada dalam hubungan konflik. Dalam bukunya *religion in an Age of Science* Barbour mengusulkan empat tipologi (mirip tipologi yang digunakan Haught) untuk memetakkan berbagai pendekatan yang di pakai dalam sain dengan agama. Empat tipologi itu adalah konflik,¹⁹ independen,²⁰ dialog,²¹ dan integrasi.²² Pada dua tipologi yang pertama sains dan ilmu (kebebasan berpikir dan etika) berpisah. Sedangkan pada dua tipologi yang terakhir antara keduanya ada pada ruang bertemu untuk berdialog atau bahkan berintegrasi.

¹⁸ *Ibid.*, h. 357.

¹⁹ Pada tipologi ini ilmu (kebebasan berpikir) diwakili oleh teori evolusi dan agama (etika) diwakili oleh kitab suci. Bagi kelompok penganut pendekatan ini mengatakan sain dan agama bertentangan karena bagi mereka, orang tidak bisa mempercayai Tuhan dan teori evolusi secara serentak. Lihat Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan*, terj. E.R. Muhammad, (Bandung: Mizan, 2002), h. 40.

²⁰ Pandangan alternatif kedua ini mengatakan bahwa sains dan agama adalah dua domain independen yang dapat hidup bersama sepanjang mempertahankan “jarak aman” satu sama lain yakni sains diposisikan pada urusan alam dan fakta obyektif, sedangkan agama diposisikan pada urusan nilai dan makna tertinggi. *Ibid.*, h. 41.

²¹ Salah satu bentuk dialog adalah membandingkan metode kedua bidang (agama dan sains) yang dapat menunjukkan kemiripan dan perbedaan. Misalnya model konseptual dan analogi dapat dipergunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak dapat diamati (misalnya Tuhan atau partikel subatom). *Ibid.*

²² Sains digunakan untuk menjastifikasi kebenaran agama. Misalnya dalam *natural theology* telah dikenal tradisi panjang seputar bukti ilmiah keberadaan Tuhan. *Ibid.* 42.

C. Makna Kebebasan

Kebebasan yang akan dibicarakan di sini dibedakan antara kebebasan dalam berbuat yang terikat oleh ruang dan waktu, hukum moral dan hukum sosial, dan kebebasan dalam berpikir yang pada dasarnya berwatak bebas.

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasar pilihan yang tersedia bagi seseorang. Seseorang dikatakan bebas jika tak ada hambatan dan larangan baginya untuk melakukan apa saja. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya. Dalam konteks sosial, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.²³ Dalam artian ini, kebebasan manusia mengandung pengertian bahwa di balik kebebasan terdapat tanggungjawab. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya tidak ada kebebasan tanpa tanggungjawab, dan begitu pula sebaliknya, tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan. Antara kebebasan dan tanggungjawab adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, baik dalam ranah teologi, sosial, moral agama maupun kebudayaan dan lain sebagainya.

Dalam teologi Islam, kebebasan pada manusia (tidak termasuk kebebasan berpikir) selalu ada batasan dan kekuatan yang tidak bisa dilawan.²⁴ Batasan itu bisa berupa fisik dan bisa berupa moral keagamaan. Sebebas-bebas manusia, ia tetap terikat dengan hukum fisik, misalnya hukum alam yang membatasi manusia tidak bisa mencapai semua imajinasi dan angan-angannya, terkait dengan keterbatasan

²³ Desi Fernanda, *Etika Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), h. 9.

²⁴ Berbeda dengan pendapat al-Juba'i sebagai representasi kaum mu'tazilah. Ia berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya atas kehendaknya sendiri, dan daya untuk mewujudkan kehendak itu terdapat dalam diri manusia itu sendiri sebelum adanya perbuatan. Lihat al-Syahrastani, *Jitab al-Milal wa an-Nihal*, Muhammad Ibn Fath Allah al-Badrani (ed.), (Kairo: tp., 1951), h. 81. Juga Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 102.

ruang dan waktu. Secara moral semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kebebasan yang sejati adalah kebebasan seseorang agar tidak terbelenggu oleh kebodohan dan kenistaan hidup.²⁵ Dari sudut pandang moral keagamaan, orang yang merdeka adalah mereka yang bebas dari keterikatan dan ketundukan pada kekuatan yang menurunkan derajad kemanusiaannya.²⁶

Dalam menilai semua upaya penyelarasan kehendak bebas dengan daya dan pengetahuan Ilahi sangat penting di amankan dan didamaikan fakta-fakta berikut; kebebasan manusia, tanggungjawab, harkat moral, keadilan Allah, dan kejujuran, juga ketergantungan ciptaan pada penciptanya secara total. Menurut Kant, kehendak bebas bisa tercapai karena adanya kemungkinan, yang tidak tergantung pada semua kepentingan diri, untuk menundukkan diri sendiri pada hukum moral sedemikian rupa sehingga kehendak itu menentukan hukum bagi dirinya sendiri.²⁷

Berbeda dengan kebebasan bertindak atau berbuat, kebebasan berpikir tidak terikat oleh nilai-nilai tertentu dalam arti, apapun boleh dan tidak haram dipikirkan, bahkan dalam konteks mempertahankan eksistensi kebudayaan, kebebasan berpikir justru mutlak dibutuhkan bagi kebudayaan. Misalnya, kebebasan berpikir dalam melakukan ijтиhad merupakan sesuatu yang vital dalam pengembangan kebudayaan Islam. Penutupan pintu ijтиhad berarti awal kejatuhan kebudayaan Islam.²⁸

Kebebasan berpikir tidak berarti pemutlakan terhadap hasil pemikiran, kebebasan berpikir tidaklah berbahaya sepanjang hasilnya tidak dipandang absolut. Karena pemutlakan dari hasil pemikiran seseorang untuk orang lain pada dasarnya akan menimbulkan tindakan anarkhis,

²⁵ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), h. 217.

²⁶ *Ibid*, h. 218.

²⁷ Loren Bagus , *Kamus Filsafat*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 841-846.

²⁸ Musa Asy'arie, "Konsep Quranik tentang Strategi Kebudayaan", dalam Abdul Basir Solissa dkk. (ed.), *al-Qur'an dan Pembinaan Budaya Dialog dan Transformasi*, (Yogyakarta: LESFI, 1993), h. 10.

memaksa orang untuk menerima dan mengikuti suatu hasil pemikiran seseorang. Dan ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia dan *sunnatullah*.²⁹ Dalam konteks ini, betapapun validnya sebuah hasil pemikiran harus dipahami dan diletakkan dalam ketidakmutlakan (kenisbian), yang bersifat terbuka menerima perubahan secara dinamis.

Melalui tinjauan filosofis dan historis, Harun Nasution menyimpulkan bahwa kebudayaan Islam di zaman klasik berkembang pesat bahkan mengambil bentuk peradaban yang tinggi, karena ada kebebasan berpikir, sehingga pemikiran menjadi terbuka dan pandangan menjadi luas, sikap menjadi dinamis, dan pemikiran rasional dapat berkembang dengan baik.³⁰ Dengan demikian, maka kebebasan berpikir berkait erat dengan eksistensi kebudayaan di mana manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Dengan kata lain, kemajuan sebuah kebudayaan, salah satunya, ditentukan oleh adanya kebebasan berpikir. Rasio manusia harus dilatih dan dipertajam melalui upaya memberikan dan melengkapinya dengan alat analisis untuk melihat realitas sosial dan mengevaluasi perubahan sosial secara kritis agar tidak membuat diri kita hilang dalam gelombang besar transformasi budaya. Jika tidak, manusia akan tergiring oleh transformasi budaya tersebut ke dalam “kepribadian terbelah” (*split personality*).³¹

Dalam konteks kebudayaan, nabi Muhammad SAW telah memberikan keteladanan dalam sunnah berpikirnya yang mampu mentransendir realitas, imajinatif dan mempunyai komitmen moralitas dan kemanusiaan yang tinggi. Sunnah nabi dalam berpikir tersebut adalah berpikir dengan basis akal *qudsi* yang disebut oleh Ibnu Sina dengan *al-hads* yaitu kecerdasan transenden, yang dalam al-Qur'an bersendikan pada *hikmah* (diartikan sebagai filsafat) dan kitab al-Qur'an. Adapun prosesnya adalah dengan menyatukan pikir dan zikir. Dengan kestuan pikir dan zikir itu dikembangkan untuk memasuki pengalaman spiritual,

²⁹ *Ibid.*, h. 11.

³⁰ Harun nasution, “Tinjauan Filosofis tentang Pembentukan Kebudayaan dalam Islam”, dalam *Ibid.*, h. 32.

³¹ M. Amin Abdullah, *Antara al-Ghazali dan kant: Filsafat Etika islam*, edisi terjemahan oleh Hamzah, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 217.

yang akan memberikan makna yang lebih tinggi pada apa yang ada dilangit dan ada di bumi Yang telah diciptakan Tuhan dengan kebenaran, bukan kebatilan, dan dengan rendah hati memohon ampunan atas segala tindakannya yang tidak benar.³² Oleh karena itu dalam kasus kebebasan berpikir dalam melakukan ijтиhad, implementasinya tetap diperlukan sebuah etika. Etika yang dimaksud adalah sikap rendah hati dengan mengosongkan ruang batin dari egoisme sempit yang hanya mementingkan diri sendiri, terbuka terhadap adanya kebenaran lain, mau mendengar dan mempertimbangkannya, serta bersedia menerima pendapat yang baik. Dengan etika demikian pemikirannya akan lebih terjaga dari kekeliruan.³³

Dalam konteks visi kenabian, kebudayaan manusia termasuk berpikir adalah tanggungjawab kreatif yang berdimensi moral, artinya kebebasan kreatif yang menjadi pusat tumbuhnya kebudayaan tidak bebas nilai, baik dalam pengertian teologis maupun Etika. Hanya dalam kontek ini maka kebudayaan akan dapat menjadi ibadah seseorang kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika sebuah kebudayaan sudah dilepaskan dari nilai-nilai etika, kebudayaan bisa menjadi perlawanan seseorang kepada hukum-hukum Tuhan, yang pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri.³⁴

Nilai moral yang menjadi landasan kebudayaan adalah nilai-nilai moral yang bersifat universal yang berbasis pada kemanusiaan dan spiritualitas agama, yang jika disodorkan kepada seseorang secara kodrat ia akan menerima dan menyetujuinya sebagai kebaikan. Dengan mengikatkan diri pada nilai moralitas universal tersebut, suatu kebudayaan akan menjadikan kehidupan ini menjadi lebih seimbang, artinya tidak melawan kodrat hidupnya, sehingga kebudayaan menjadi bentuk kepatuhan dan ketaatan seseorang pada hukum-hukum Tuhan.³⁵

³² Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 21-23.

³³ Etika tersebut didasarkan pada al-Qur'an 39:18 sebagaimana dikutip oleh Musa Asy'arie. Lihat *Ibid.*, h. 107.

³⁴ *Ibid.*, h. 24.

³⁵ *Ibid.*, h. 26.

D. Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani; *ethikos, ethos* yang berarti kebiasaan atau watak.³⁶ Juga berasal dari bahasa perancis *etiquette* yang juga berarti kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Franken sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda mengemukakan bahwa etika (*ethic*) adalah salah satu cabang filsafat yang tentu mencakup filsafat moral atau pemberian-pemberian filosofi (*phylosiphical judgments*). Secara konseptual, istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai suatu sistem nilai, berkaitan dengan apa yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang menentukan etika itu melalui kesepakatan. Oleh karena itu, implementasinya etika dalam kehidupan masyarakat secara umum banyak dikembangkan dan dibakukan sebagai norma-norma yang mengatur tata kehidupan sebuah komunitas.³⁷ Secara filosofis, etika tidak mempersoalkan *apa* atau *siapa* manusia itu, tetapi mempersoalkan *bagaimana* manusia seharusnya berbuat atau bertindak.³⁸

172

Etika yang juga disebut filsafat moral adalah cabang disiplin aksilogi yang membicarakan dan berusaha mendapatkan simpulan tentang norma tindakan serta pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Etika menganalisis konsep-konsep seperti keharusan, kemestian, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung-jawab, dan lain sebagainya. Pembagian bidang kajian etika setidaknya menyangkut empat bidang yaitu *pertama*, moralitas berdasarkan kitab suci (*scriptural morality*), *kedua*, etika teologis (*theological ethics*), *ketiga*, etika kefilsafatan (*philosophical ethics*), dan *keempat*, moralitas keagamaan (*religious morality*).³⁹

³⁶ Lorens Bagus, *Op. Cit.*, h. 217.

³⁷ Desi Fernanda, *Op. Cit.*, h. 2-5.

³⁸ Jan Hendrik Rapaport, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), h. 62.

³⁹ Madjid Fakhry, *Ethical Theories in Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1991), h. ix. Juga Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 83.

Ada enam prinsip yang merupakan landasan prinsipil dari etika yaitu prinsip keindahan (*beauty*), persamaan (*equality*), kebaikan (*goodness*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*), dan prinsip kebenaran (*truth*). Pada prinsip yang terakhir ini biasanya di takar dengan logika ilmiah yang bersifat realistik, faktual, dan dapat dibuktikan; karena pada kenyatannya, kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan secara nyata baik itu kebenaran agama maupun kebenaran ilmiah.⁴⁰

Namun ketika agama memberikan informasi tentang alam gaib misalnya, yang diyakini atas kebenarannya maka harus dikatakan bahwa tidak semua kebenaran dapat dibuktikan dengan logika ilmiah. Ada pula kebenaran yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan yaitu kebenaran teologis dan agama. Untuk itu kiranya perlu ada jembatan yang menghubungkan antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in mind*) dengan kebenaran dalam kenyataan (*truth in reality*). Melalui jembatan ini akan dapat dipilih kapan dan pada ranah apa sebuah kebenaran dalam pemikiran (*truth in mind*) dapat dibuktikan dengan kebenaran dalam kenyataan (*truth in reality*). Dan kapan pula kebenaran dalam pemikiran tidak harus dibuktikan dengan kebenaran realita. Dengan demikian tidak akan ada lagi keangkuhan dan hegemoni ilmu (sains) terhadap agama. Jembatan yang dimaksud adalah norma atau hukum yang disepakati yang dapat menjamin terciptanya enam prinsip tersebut.

Norma atau hukum yang disepakati ada yang bersifat absolut dan ada pula yang bersifat relatif. Yang absolut kebenarannya berupa hukum-hukum Allah (*syari'ah*), sedangkan yang kebenarannya relatif adalah hukum atau norma yang diciptakan oleh manusia misalnya hukum-hukum fiqh dan hukum adat yang diciptakan oleh masyarakat komunitas⁴¹ sosial tertentu.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 9.

⁴¹ Komunitas dalam arti luas menunjuk pada setiap struktur sosial yaitu setiap persatuan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan umum. Namun biasanya "komunitas" dipakai sebagai sebutan kelompok alamiah (keluarga, rakyat, dan sebagainya) atau bagi persekutuan-persekutuan yang tumbuh dari ide atau tujuan yang sama yang menyatukan. Lihat Lorens Bagus, *Op. Cit.*, h. 473.

Kedua norma tersebut yang mesti diharapkan dapat menjembatani antara apa yang dipikirkan manusia dan kenyataan. Oleh karenanya mengukur sebuah kebenaran sangat ditentukan oleh alat ukur dan jembatannya. Jika kebenaran diukur dan melalui jembatan norma yang mempunyai kebenaran absolut, maka legitimasinya berlaku untuk siapa-pun yang mengakui keabsolutannya. Jika kebenaran diukur dengan norma atau hukum yang kebenarannya bersifat relatif seperti hukum adat maka legitimasinya akan berfariasi, artinya sesuatu dapat dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat tertentu dalam kasus yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh masyarakat yang lain. Misalnya, kriteria pornoaksi, apa yang dianggap oleh masyarakat Islam di Jawa pada umumnya sebagai tindakan pornoaksi, seperti membuka aurat di muka umum, mungkin tidak demikian jadinya ketika sikap itu dilakukan oleh masyarakat pedalaman di Papua yang selalu berpakaian dengan koteka. Oleh karenanya etika sangat erat hubungannya dengan norma yang disepakati.

E. Perjumpaan Sains dan Agama

Holmes Rolston mengatakan bahwa ketika melihat posisi sains dan agama sering muncul pemikiran bahwa konsep saintifik tentang alam membuat keyakinan terhadap supernatural menjadi *impossible*, mengada-ada, dan bahkan sebagai hayalan belaka. Kepercayaan kepada kekuasaan dan kekuatan hal-hal yang gaib (supernatural) sudah nasinya akan hilang dan lenyap, dari seluruh penjuru dunia, sebagai hasil terus meningkatnya difusi dan ketercukupan pengetahuan ilmiah. Misalnya, ketika ilmu fisika dipelajari secara mendalam, maka semakin menuik semakin tidak diperlukan informasi dari agama tentang alam, karena sudah dapat dijelaskan oleh ilmu fisika tersebut. Praktis etika juga tak diperlukan. Pertanyaan apakah nasib supernatural akan menjadi sesuatu yang baik atau jelek untuk manusia adalah sudah tidak relevan untuk diprediksi. Seorang antropolog, Antony F.C. Wallace, memprediksi bahwa aliran ketuhanan (agama) akan lenyap.⁴²

⁴² Holmes Rolston, *Science and Religion, a Critical Survey*, (New York: Random House, 1987), h. 298.

Tetapi barangkali tidak demikian sederhana. Walaupun penjelasan ilmiah dan supernaturalistik kadang-kadang barsaingan, sebagaimana kita melihatnya, apakah mereka mesti harus tak bisa diacuhkan antara satu terhadap yang lain? John Haught mencoba memberikan jalan tengah dengan mengusulkan bahwa agama atau bisa juga etika dengan suatu cara yang sangat mendalam, mendukung seluruh upaya kegiatan ilmiah, tentu tidak untuk memperkuat cara-cara berbahaya yang di dalamnya pengetahuan ilmiah sering kali diterapkan dalam kenyataan walaupun berpotensi membahayakan kehidupan.⁴³

Dewasa ini sains sebagai hasil kebebasan berpikir telah dikritik dengan sangat pedas. Banyak kritikus berpikir bahwa sains itu bertanggung jawab atas sebagian besar penyakit yang diderita dunia modern ini. Menurut mereka, kalau bukan karena sains, mungkin kita tidak akan mengalami ancaman nuklir, tidak akan mengalami polusi udara, tanah, dan air. Dunia ini mungkin menemukan nasib yang lebih baik jika tidak ada sain, tetapi yang ada adalah agama atau pun etika.⁴⁴

Kritik tersebut ingin mengatakan bahwa kehebatan sain dengan segala temuan-temuannya melalui kebebasan berpikir dengan melakukan eksperimen *trial and error* jika tidak dibingkai oleh agama atau pun etika akan berujung pada arogansi sains terhadap agama atau etika, sehingga sains menginginkan lepas sama sekali dari agama atau etika. Yang demikian ini menunjukkan bahwa ambisi sains nampak berlebihan tanpa menyadari atas kekurangannya.

Keangkuhan sain terhadap agama atau etika sesungguhnya tidak perlu terjadi, ketika memperhatikan tugas suci yang diemban oleh umat manusia yaitu meramaikan dan menjaga harmonisasi kehidupan di bumi. Nah, dengan demikian agar sains tidak tertuduh dan bertanggung jawab atas krisis ekologi misalnya, maka sedini mungkin harus memperhatikan agama atau pun etika. Tetapi agama atau etika tidak seharusnya menghambat gerak sains untuk berkembang sesuai dengan karakteristik

⁴³ John F. haughty, Op. Cit., h. 25.

⁴⁴ Ibid.

dasarnya yang selalu dinamis, rasional dan realistik. Jika hubungan seperti ini yang terjadi maka di sinilah tempatnya sains bertemu dan berkonfirmasi dengan agama dan juga etika.

F. Simpulan

Manusia sesuai dengan fitrahnya diberikan berpikir apa saja. Secara ontologis kebebasan berpikir tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi kebebasan berpikir itu secara aksiologis ketika ada pada ranah sosial dan mewujud dalam bentuk perbuatan, maka dibatasi dengan tanggungjawab dan moral. Dengan kata lain ketika berpikir disertai dengan berbuat maka tidak bebas nilai dan konsekuensinya akan ada sanksi ketika tidak sesuai dengan nilai atau norma yang disepakati. Inilah yang dimaksud dengan “ruang bertemu” antara kebebasan berpikir dan etika.

Namun ketika berpikir tidak disertai dengan berbuat, maka bebas sebebas-bebasnya dan tidak mempunyai konsekuensi sanksi. Di sinilah “ruang berpisah” antara kebebasan berpikir dan etika, masing-masing terlepas dari yang lain. Dan pada ruang inilah ilmu sebagai produk pemikiran berpisah dengan nilai, sehingga “ilmu ya ilmu” tidak lagi harus dikontrol oleh etika. Bahkan dalam konteks menemukan kebenaran ilmiah dengan ukuran logika maka berpikir apapun tidak akan ada sanksi. Begitu pula, berbuat yang tidak didasari berpikir tidak akan ada sanksi.

Menurut filsafat Islam, di mana dasar pijakannya adalah *hikmah* dan al-Qur'an, budaya berpikir dalam implementasinya, sebagaimana dicontohkan oleh nabi, adalah tidak bebas nilai. Begitu pula ilmu sebagai produk berpikir tentu juga tidak bebas nilai. Secara etika, ilmu harus dapat mensejahterakan kehidupan bukan sebaliknya. Dengan demikian ilmu sebagai sarana menemukan kebenaran berimpit “untuk tidak mengatakan lengket” dengan etika pelayanan bagi sesama manusia dan tenggungjawab agama.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghazali dan kant: Filsafat Etika islam*, edisi terjemahan oleh Hamzah, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- _____, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- _____, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- _____, "Konsep Quranik tentang Strategi Kebudayaan", dalam Abdul Basir Solissa dkk. (ed.), *al-Qur'an dan Pembinaan Budaya Dialog dan Transformasi*, Yogyakarta: LESFI, 1993.
- Awing, A. C., *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*, terjemahan Uzair Fauzan, Rika Iffati Farikha, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. 177
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Barbour, Ian G., *Juru Bicara Tuhan*, terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan, 2002.
- Bochenksi, J. M., "Apakah Sebenarnya Berpikir", dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), *Ilmu dalam Perspektif*, Cet. XV, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Daldjoeni, N., "Hubungan Etika dengan Ilmu", dalam Jujun S. Suriasumantri *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Cet XVII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Fakhry, Madjid, *Ethical Theories in Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1991.al-Muqaddasi, Faidullah al-Hasani, *Fath al-Rahman li Thalib Ayat al-Qur'an*, Jeddah: al-Haramain, tt.

Haught, John F. *Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog*, terj. Fransiskus Borgias, M.A., Bandung: Penerbit Mizan, 2004.

Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

Nasution, Harun *Falsafah Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

_____, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 1986.

_____, "Tinjauan Filosofis tentang Pembentukan Kebudayaan dalam Islam", dalam Abdul Basir Solissa dkk. (ed.), *al-Qur'an dan Pembinaan Budaya Dialog dan Transformasi*, Yogyakarta: LESFI, 1993.

178

Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafa* , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.

Sahakian, Willian S. dan Mabel Lewis Shahakian, *Relism of Philosophy*, Cambridge, Mass: Scenkman, 1965.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Cet XVII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Suseno, Franz Magnis, "Harun Nasution dan Filsafat Agama di Indonesia", dalam Abdul Halim (ed.), *Teologi Islam Rasional, Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution*, Jakarta: Ciputat Pers, 2001.

al-Syahrastani, *Kitab al-Milal wa an-Nihal*, Muhammad Ibn Fath Allah al-Badrān (ed.), Kairo: tp., 1951.[]